

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi Kebijakan dinilai menggunakan Teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman menunjukkan bagaimana dinas-dinas terkait dalam perda ini sebagian belum melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai pasal-pasal yang tertulis. Hanya ada satu pasal yang terimplementasi sesuai sampai tuntas, selebihnya belum terimplementasi secara maksimal. Kendala yang terjadi dilapangan berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan kendala besar berupa kendala anggaran, kendala personil, hingga kendala dari kebijakan itu sendiri.

6.2. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan agar pemerintah dan dinas-dinas di terkait dengan Kab. Dharmasraya agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.

Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Dari segi aturan kebijakan, pertama Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya sebaiknya segera mulai merealisasikan kebijakan turunan yaitu Peraturan Bupati atas Peraturan daerah ini. Selanjutnya menetapkan lokasi lahan Pemakaman Daerah, serta menyusun APBD Kab. Dharmasraya terkait masalah finansial dalam implementasi Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Untuk di Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya, Dinas Sosial P3APPKB Kab. Dharmasraya, serta Satpol PP dan Damkar Kab. Dharmasraya sebagai aktor implementasi sebaiknya lebih maksimal dalam melaksanakan tugas masing-masing, selain itu sebaiknya lebih maksimal dalam hal komunikasi antar organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustin, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). *The Policy Implementation Process. Administration & Society*, 6(4): 445-484.

Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003

Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy Seventh Edition*. New Jersey: Prentice.

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT: Elex Media Komputindo.

Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.

Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS.

SKRIPSI/TESIS/JURNAL

Eka Mega Apriani, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman di TPU Beji*

Kota Pekalongan. Munculnya Perda Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020.

Ronelia Anggi Syafitri, *Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Tuah Madani dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman.

WEBSITE

<https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication/2024/02/28/b0529ffc8f0d30c27ec02>

[ea7/kabupaten-dharmasraya-dalam-angka-2024.html](https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication/2024/02/28/b0529ffc8f0d30c27ec02/ea7/kabupaten-dharmasraya-dalam-angka-2024.html)

